

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK TANI SAYURAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

Muhammad Sumanto Saputra¹, Mulyana^{2,3}

¹Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri

³corresponding author: mulyana@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Halmahera Selatan menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal, dengan penurunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari 85,67 pada Tahun 2021 menjadi 79,82 pada 2023. Dengan potensi lahan pertanian seluas 1.245 hektar dan dominasi komoditas hortikultura yang masih belum optimal, pembinaan kelompok tani menjadi strategi utama yang diterapkan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi organisasi, struktur kelembagaan, pedoman teknis, serta penyediaan sarana prasarana telah mendukung pelaksanaan program, meskipun terbatas oleh anggaran dan jumlah sumber daya manusia (penyuluh). Pada dimensi interpretasi, para pelaksana memahami tujuan kebijakan dan menerapkannya melalui komunikasi rutin serta peninjauan lapangan, namun masih menghadapi kendala rendahnya kesadaran petani dan kondisi ekologis. Pada dimensi aplikasi, pembinaan dilaksanakan melalui tahapan coaching, monitoring, dan evaluasi serta diwujudkan dalam pendampingan teknis dan pemberian bantuan pertanian, meskipun peningkatan kapasitas sumber daya masih dibutuhkan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani sayuran di Kabupaten Halmahera Selatan telah diselenggarakan dengan cukup baik.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Implementasi Kebijakan, Pembinaan Kelompok Tani, Hortikultura.

Copyright (c) 2025 Muhammad Sumanto Saputra, Mulyana



This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International
License.

ABSTRACT

decline in the Food Security Index (IKP) from 85.67 in 2021 to 79.82 in 2023. With 1,245 hectares of agricultural land and the dominance of horticultural commodities that are still not optimal, farmer group development has become the main strategy implemented by the local government through the Agriculture, Plantation, and Food Security Agency. This research method is descriptive qualitative with an inductive approach. The results show that in terms of organization, institutional structure, technical guidelines, and infrastructure provision have supported program implementation, despite limitations in budget and human resources (extension workers). In terms of interpretation, implementers understand policy objectives and apply them through regular communication and field reviews, but still face challenges due to low farmer awareness and ecological conditions. In terms of application, guidance was carried out through coaching, monitoring, and evaluation stages and was manifested in technical assistance and agricultural aid, although capacity building was still needed. In conclusion, the implementation of food security policies through the guidance of vegetable farmer groups in South Halmahera Regency has been carried out quite well.

Keywords: Food Security, Policy Implementation, Farmer Group Guidance, Horticulture.

PENDAHULUAN

Ketahanan Pangan menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai kabupaten dengan populasi terbesar di Maluku Utara yang mencapai 252,864 jiwa pada Tahun 2023 (BPS Maluku Utara, 2023). Data distribusi penduduk tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar dalam menjamin ketahanan pangan dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara. Merujuk pada data BPS Provinsi Maluku Utara (2023), bahwa dengan populasi mencapai 252,864 jiwa atau sekitar 18% dari total penduduk Maluku Utara, tekanan terhadap kebutuhan pangan di kabupaten ini jauh lebih tinggi. Kondisi geografis kepulauan dengan 8 kecamatan yang tersebar di

berbagai pulau semakin menambah kompleksitas dalam distribusi dan pemenuhan kebutuhan pangan. Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan permintaan pasar terhadap komoditas pangan khususnya sayuran semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tren Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Halmahera Selatan yang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir:

Merujuk pada data Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan (2018-2023) yang diperoleh peneliti melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Selatan, dapat dilihat bahwa, tren IKP menunjukkan pola yang memprihatinkan dimana setelah mencapai

peningkatan konsisten dari Tahun 2018-2021, terjadi penurunan tajam sebesar 5,04 poin pada Tahun 2022 dan berlanjut menurun 0,81 poin di Tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan sistemik dalam pengelolaan ketahanan pangan di kabupaten ini. Jika dibandingkan dengan standar nasional dimana IKP minimal yang diharapkan adalah 85,00, maka capaian Kabupaten Halmahera Selatan saat ini (79,82) berada jauh di bawah target. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat posisinya sebagai kabupaten dengan populasi terbesar di provinsi. Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat posisi strategis Kabupaten Halmahera Selatan sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Maluku Utara yang mencapai 252,864 jiwa. Penurunan drastis nilai IKP dari 85,67 pada Tahun 2021 menjadi 80,63 pada Tahun 2022 dan terus menurun menjadi 79,82 pada Tahun 2023 mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam sistem ketahanan pangan kabupaten ini. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, mengingat rata-rata pemenuhan kebutuhan pangan hortikultura dari produksi lokal hanya mencapai 74%, sementara 26% sisanya masih harus dipenuhi dari luar daerah.

Pembinaan kelompok tani hortikultura sayuran dipilih sebagai fokus penelitian karena sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat Kabupaten Halmahera Selatan memiliki lahan pertanian potensial seluas 1,245 hektar yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah secara optimal untuk pertanian hortikultura terutama sayuran. Data dibawah ini menunjukkan distribusi kelompok tani berdasarkan kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

Merujuk pada data Distribusi Kelompok Tani per Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan (2023), yang bersumber dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Selatan, bahwa persebaran kelompok tani yang tidak merata antar kecamatan mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap pembinaan dan pengembangan pertanian. Kecamatan Bacan Timur dengan 32 kelompok tani memiliki potensi pengembangan yang lebih besar, sementara Kecamatan Kayoa dengan hanya 19 kelompok tani memerlukan perhatian khusus. Rata-rata setiap kelompok tani beranggotakan 16-17 orang, namun tingkat produktivitas antar kelompok masih bervariasi. Hal ini mengindikasikan perlunya standarisasi

dalam pembinaan dan pendampingan teknis.

Data dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan tren produksi hortikultura sayuran selama periode 2021-2022 sebagai berikut:

Merujuk pada data Produksi Tanaman Hortikultura Sayuran Kab. Halmahera Selatan (2021-2022) yang bersumber dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Selatan, diketahui bahwa data produksi hortikultura sayuran menunjukkan gap yang signifikan antara produksi dan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan terbesar terdapat pada komoditas bayam dengan Tingkat pemenuhan hanya 63.1%, diikuti cabai besar (65.2%) dan kangkong (68.5%). Meskipun beberapa komoditas seperti buncis menunjukkan tingkat pemenuhan yang lebih baik (87.6%), secara keseluruhan rata-rata pemenuhan kebutuhan masih di bawah 80%. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah yang berimplikasi pada tingginya harga dan risiko kelangkaan saat terjadi gangguan distribusi. Data diatas menunjukkan peningkatan produksi pada hampir semua komoditas, capaian ini masih jauh dari

kebutuhan konsumsi masyarakat. Rata-rata pemenuhan kebutuhan pangan hortikultura dari produksi lokal hanya mencapai 74% sehingga 26% sisanya harus dipenuhi dari luar daerah. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luas lahan pertanian yang potensial mencapai 1,245 hektar yang tersebar di berbagai kecamatan.

Penelitian terdahulu yang mengkaji ketahanan pangan belum banyak dilakukan. Sebagaimana penelitian Simanjuntak & Erwinskyah (2020) yang mengkaji kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Penelitian berikutnya mengkaji ketahanan pangan rumah tangga melalui aspek strategi (Ariningsih & Rachman, 2008). Di sisi lain, penelitian Kariyasa & Suryana (2012) menyatakan bahwa ketahanan pangan dapat diperkuat melalui pengurangan pangan yang boros. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiya et al. (2024) mengkaji aspek pemanfaatan pada ketahanan pangan. Di sisi lain disebutkan pula bahwa limbah pascapanen buah dan sayuran merupakan persoalan global yang signifikan, sehingga penanganannya menjadi kunci dalam mendukung ketahanan dan keamanan pangan, keberlanjutan ekonomi, serta pengurangan dampak lingkungan (Rajapakshe, et. al., 2026). Merujuk pada penelitian terdahulu tersebut, penulis

menyatakan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut, bahwa penulis mengkaji kebijakan ketahanan pangan dari aspek implementasi kebijakan dan secara spesifik mengkaji pembinaan kelompok tani sayuran. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani sayuran di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

KAJIAN TEORI

Hortikultura merupakan bidang budidaya sayuran, buah, dan tanaman hias (Zulkarnain, 2009). Berikutnya, Arifin (2005) mengemukakan bahwa ketahanan pangan bertumpu pada tiga dimensi pokok. Pertama, ketersediaan pangan, yang mencakup produksi, distribusi, dan pengolahan yang harus terjamin melalui suplai domestik, cadangan pangan, impor pelengkap, serta bantuan darurat. Kedua, aksesibilitas masyarakat, yang meliputi akses fisik melalui infrastruktur, akses ekonomi melalui daya beli, serta akses sosial yang bebas dari diskriminasi. Ketiga, stabilitas harga pangan, yang ditentukan oleh konsistensi pasokan, pengendalian harga, pengelolaan stok, dan sistem logistik yang efisien. Ketahanan pangan nasional perlu diarahkan pada

pemenuhan ketersediaan, akses, dan keterjangkauan pangan melalui integrasi kebijakan pangan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, yang diimplementasikan secara bertahap dalam strategi jangka pendek, menengah, dan panjang pada level makro, meso, dan mikro (Salasa, 2021). Di sisi lain, menurut Jones (1996), implementasi merujuk pada proses menjalankan dan menuntaskan tugas agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Merujuk pada berbagai pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terjaminnya ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan stabilitas pangan yang dikelola melalui sistem produksi, distribusi, dan kebijakan terintegrasi guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Creswell (2016) menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami pandangan banyak individu atau kelompok tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan, Sekretaris Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan, Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Bidang Ketersediaan dan Ketahanan Pangan, Kepala Bidang SDM Penyuluhan, Penyuluhan Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan, dan Petani Hortikultura Sayuran. Jumlah informan sejumlah 12 orang. Kriteria pemilihan informan adalah orang-orang yang memahami dan terlibat langsung ke dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Informan ditentukan secara purposif. Lokasi penelitian di Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan. Disamping itu dilakukan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, *display*, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Pembinaan Kelompok Tani Sayuran di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

Penelitian ini peneliti mengambil data dan fakta di lapangan yang di analisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Jones (1996), yang terdiri dari tiga dimensi yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Uraian lebih lanjut sebagai berikut.

1. Organisasi

Sumber daya manusia, struktur organisasi dan juga kelengkapan sarana dan prasarana sangat diperlukan suatu organisasi terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan, Ir. Agus Heriawan, SP, S.Hut, M.Si., IPM., diketahui bahwa upaya pemenuhan ketersediaan pangan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya instansi pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia yang dimiliki dinas, termasuk pegawai, staf, dan penyuluhan, dinilai telah mampu melaksanakan program serta pengolahan data kebutuhan petani. Namun demikian, beberapa hambatan masih dijumpai, terutama terkait percepatan peningkatan produksi petani dan

keterbatasan lahan akibat karakteristik wilayah kepulauan. Selain itu, rendahnya kemandirian petani dalam budidaya hortikultura juga menjadi tantangan, karena petani cenderung memilih tanaman tahunan seperti cengkeh dan pala yang dianggap lebih mudah dikelola dibandingkan komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, dan bawang merah. Oleh sebab itu, peran penyuluh menjadi sangat strategis sebagai garda terdepan dalam membina dan meningkatkan kapasitas petani untuk mendorong produksi hortikultura.

Wawancara dengan Kepala Bidang SDM Penyuluhan, Salim Maswara, S.P., pada 14 Januari 2025 menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah penyuluh menjadi salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan pembinaan petani. Dengan hanya 44 penyuluh yang tersebar di 17 kecamatan, bahkan beberapa kecamatan tidak memiliki penyuluh, kapasitas pendampingan kepada kelompok tani menjadi kurang optimal. Meskipun demikian, para penyuluh telah berupaya maksimal dalam memberikan pemahaman, pelatihan, serta peningkatan keterampilan petani untuk mendorong produktivitas pangan, termasuk hortikultura sayuran. Hambatan lain yang teridentifikasi adalah kecenderungan petani untuk memilih budidaya tanaman

tahunan seperti rempah-rempah yang dianggap lebih mudah dibanding hortikultura sayuran, meskipun berbagai bantuan seperti pupuk dan bibit telah disediakan oleh pemerintah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa aspek sumber daya manusia, baik dari sisi penyuluh maupun petani, masih menjadi tantangan utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi pertanian.

Pernyataan informan tersebut sejalan dengan data yang penulis peroleh. Dari data yang diperoleh penulis, dapat diketahui bahwa jumlah penyuluh di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 44 orang yang tersebar di 17 kecamatan saja dan 13 kecamatan lainnya hanya mempunyai kelompok tani tetapi tidak mempunyai penyuluh sehingga hal ini tentunya menjadi salah satu hambatan ataupun menjadi permasalahan dalam proses pengimplementasian kebijakan ketahanan pangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian khususnya hortikultura sayuran dan juga tentunya diperlukan pengelolaan organisasi dan kerjasama yang baik antar berbagai pihak terutama pelaksana kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar program berjalan dengan optimal dan efektif.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan serta Kepala Bidang Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan didukung oleh pembagian tugas yang jelas antarbidang serta koordinasi yang intensif. Setiap bidang menjalankan perannya secara spesifik, seperti bidang tanaman pangan dan hortikultura yang bertanggung jawab dalam penyediaan bibit, bantuan infrastruktur, dan pendampingan budidaya; bidang ketahanan pangan yang memastikan ketersediaan, kualitas gizi, dan pemasaran hasil pangan; serta bidang SDM penyuluhan yang berperan langsung dalam pembinaan kelompok tani. Meskipun masing-masing memiliki tugas

fungsional yang berbeda, setiap bidang tetap melakukan koordinasi melalui pertukaran data dan informasi untuk memastikan tercapainya tujuan bersama, yaitu peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Selatan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas bidang menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan pangan.

Dinas Pertanian Perkebunan dan ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan penyaluran bantuan seperti sarana dan prasarana, pupuk serta bibit tanaman untuk pembinaan petani khususnya hortikultura sayuran. Penyalurannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Bantuan Fisik Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024

No	Jenis Kegiatan	Nama Barang/Pengadaan	Jumlah
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha tani	14 Unit
		Irigasi Air Tanah dangkal	4 Unit
		Irigasi air tanah dalam	34 Unit
2	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Kendaraan Roda 3 (Viar)	17 Unit
		Hansprayer Semi Otomatis	205 Buah
		Mesin Potong Rumput	25 Unit
		Mulsa	237 Ball
		Cultivator	23 Unit
		Handraktor	23 Unit
		Perpompaan	3 Unit
		TR2	7 Unit

		Combine	2 Unit
3	Pengadaan bibit/benih	Padi	7,5 Ton
		Cabe rawit	351 Sachet
		Kangkung	91 Sachet
		Terong	80 Sachet
		Sawi	160 sachet
		Tomat	6815 Sachet
		Cabe Kriting	160 Sachet
4	Pengadaan Obatobatan	Pupuk High Golden	7257 Sachet
		Roun Up	500 Liter
		Monstaf	658 Botol
		Marshal	1037 botol
		Furadan	311 Bungkus
		Fungisida	20 Botol
		Herbisida	16 Botol
		Insectisida	20 Botol
		Pupuk Magnesium	50 Ton

Sumber: Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan, 2024 (diolah peneliti)

Data di atas diperkuat juga oleh hasil wawancara penulis yang menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan secara rutin menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petani. Namun, keterbatasan anggaran, kurangnya penyuluh, serta kendala operasional menyebabkan distribusi bantuan belum merata sehingga penetapannya harus mengikuti program prioritas. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sumber daya manusia, terutama peran penyuluh dan petani, menjadi faktor penting dalam

efektivitas pembinaan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana serta struktur program kerja yang jelas turut mendukung kelancaran kegiatan pertanian dan pencapaian tujuan organisasi. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Wanimbo et al (2020) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang memadai dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan suatu organisasi. Senada dengan hal tersebut, untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, maka dapat dilaksanakan pengembangan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitasnya (Rahmadanita et al., 2018). Di

sis lain, adanya sarana prasarana yang memadai pun menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut diperkuat oleh Santoso & Rahmadanita (2020) bahwa penguatan infrastruktur merupakan suatu aspek penting yang tidak dapat diabaikan dalam pencapaian tujuan dari program pemerintah daerah. Meskipun pelaksana kebijakan memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai, ketiadaan dukungan fasilitas operasional akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan (Setiawan et al., 2023).

2. Interpretasi

Wawancara dengan Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Bacan Timur menunjukkan bahwa penyuluh telah menjalankan pendampingan secara optimal melalui upaya mendorong kolaborasi dalam kelompok tani serta peningkatan keterampilan petani, meskipun masih dihadapkan pada rendahnya kesadaran petani dalam melakukan perawatan tanaman secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa tanaman tumbuh kurang subur dan berdampak pada hasil panen. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Desa Wayamiga mengonfirmasi bahwa pembinaan dari penyuluh telah dilakukan secara rutin dan bantuan dari dinas sangat membantu, namun petani

masih menghadapi kendala seperti serangan hama, perubahan cuaca, serta keterbatasan lahan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pembinaan telah berjalan baik, faktor internal petani dan kondisi ekologis tetap menjadi tantangan utama dalam peningkatan produktivitas hortikultura.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan dan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, menegaskan bahwa pelaksanaan tugas dan pembinaan kelompok tani telah berjalan sesuai kerangka regulatif daerah. Dijelaskan bahwa seluruh aktivitas kelembagaan berpedoman pada Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 30 Tahun 2022 yang mengatur struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas. Proses pembinaan kelompok tani, termasuk peninjauan langsung di lapangan serta dialog rutin dengan petani melalui penyuluh, dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan mendukung peningkatan produksi. Berbagai upaya pembinaan dilakukan untuk mendorong produktivitas hortikultura sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan masyarakat, dan seluruh kegiatan tersebut

tetap berpijak pada ketentuan tugas dan fungsi yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, pada dimensi interpretasi menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan telah memahami arah kebijakan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran petani dalam perawatan tanaman serta berbagai kendala ekologis yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Di sisi kelembagaan, pemerintah daerah telah menafsirkan dan menjalankan mandat regulatif sesuai Peraturan Bupati, melalui peninjauan lapangan dan komunikasi intensif dengan petani. Senada dengan hal tersebut, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci kelancaran implementasi kebijakan (Kalsum et al., 2021).

3. Aplikasi

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan bahwa prosedur kerja dalam pembinaan kelompok tani telah disusun secara sistematis berdasarkan petunjuk teknis yang menjadi acuan bagi para penyuluh di setiap kecamatan. Kepala dinas menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan mengikuti tiga tahapan utama yaitu *coaching*, *monitoring*, dan *evaluation*, untuk memastikan program berjalan sesuai alur yang ditetapkan. Selaras dengan itu, Kepala Bidang SDM Penyuluhan menegaskan bahwa seluruh proses telah dijalankan sesuai pedoman, mulai dari pemberian pemahaman dan keterampilan di tingkat dinas hingga pelaksanaan pendampingan langsung kepada petani oleh penyuluh. Dengan demikian, mekanisme kerja yang berjenjang tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan dalam pembinaan guna mendukung efektivitas pelaksanaan program.

Tabel 2. Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Halmahera Selatan

Tahun 2024

No	Jenis Tanaman	Hasil Produksi/Ton
1	Bawang Merah	307,72
2	Cabe Besar	514
3	Kangkung	274
4	Cabe Rawit	452
5	Tomat	956
6	Bayam	237
7	Ketimun	695
8	Labu Siam	30

9	Buncis	484
10	Ketimun	633
11	Kacang Panjang	437

Sumber: Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan, 2024

Produksi hortikultura Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan kontribusi terhadap dimensi ketersediaan pangan, namun capaian tersebut belum mampu meningkatkan IKP secara signifikan karena pemenuhan kebutuhan lokal baru mencapai 74% dan masih bergantung pada pasokan luar daerah. Penurunan IKP mengindikasikan bahwa persoalan aksesibilitas, keterjangkauan, dan distribusi pangan masih menjadi faktor pembatas utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang komprehensif. Wawancara dengan Kepala Bidang SDM Penyuluhan menunjukkan bahwa program kerja dinas dijalankan secara intensif melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan keterampilan bagi kelompok tani untuk mendorong peningkatan produksi, terutama mengingat tingginya kebutuhan pangan di Kabupaten Halmahera Selatan. Upaya tersebut

diwujudkan dengan mendorong petani agar lebih aktif menanam komoditas hortikultura, khususnya sayuran, guna memenuhi permintaan yang terus meningkat. Di sisi lain, hasil wawancara dengan salah seorang petani menunjukkan bahwa pendampingan penyuluhan membantu petani untuk beralih dari tanaman tahunan ke budidaya hortikultura yang lebih produktif. Selain edukasi secara teknis, pemerintah daerah juga menyediakan bantuan sarana prasarana serta dukungan pemasaran, sehingga petani merasa lebih percaya diri terhadap keberlanjutan penjualan hasil pertanian yang dimiliki. Temuan penelitian ini memperkuat pendapat Zakiya et al. (2024) yang menyatakan bahwa konsistensi sikap dari pelaksana kebijakan ketahanan pangan untuk mengikuti peraturan yang berlaku, menjadi salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Tabel 3. Jadwal Kegiatan Penyuluhan dalam Pembinaan Kelompok Tani Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan

No.	Kecamatan	Bentuk dan Teknis	Waktu
1	Bacan	A. Coaching	3 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	3 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	3 kali dalam 1 semester

2	Obi Selatan	A. Coaching	2 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	1 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	1 kali dalam 1 semester
3	Bacan barat Utara	A. Coaching	2 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	1 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	2 kali dalam 1 semester
4	Bacan Selatan	A. Coaching	2 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	2 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	2 kali dalam 1 semester
5	Bacan Timur	A. Coaching	4 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	3 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	3 kali dalam 1 semester
6	Bacan Timur Selatan		2 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	2 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	1 kali dalam 1 semester
7	Bacan Timur Tengah	A. Coaching	2 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	2 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	1 kali dalam 1 semester
8	Gane Barat	A. Coaching	2 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	1 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	1 kali dalam 1 semester
9	Gane Timur	A. Coaching	2 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	2 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	1 kali dalam 1 semester
10	Kasiruta Timur	A. Coaching	3 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	2 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	1 kali dalam 1 semester
11	Kayoa	A. Coaching	1 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	1 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	1 kali dalam 1 semester
12	Bacan Barat	A. Coaching	2 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	1 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	1 kali dalam 1 semester
13	Pulau makian	A. Coaching	2 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	1 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	1 kali dalam 1 semester
14	Makian barat	A. Coaching	1 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	1 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	1 kali dalam 1 semester
15	Mandioli Selatan	A. Coaching	2 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	1 kali dalam 1 bulan
		C. Evaluasi	1 kali dalam 1 semester
16	Mandioli Utara	A. Coaching	2 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	2 kali dalam 1 bulan

		C.Evaluasi	1 kali dalam 1 semester
17	Obi	A. Coaching	3 kali dalam 1 bulan
		B. Monitoring	2 kali dalam 1 bulan
		C.Evaluasi	2 kali dalam 1 semester
18	Obi Barat	-	-
19	Obi Timur	-	-
20	Obi Utara	-	-
21	Kepulauan Joranga		-
22	Kayoa Utara	-	-
23	Kayoa Selatan	-	-
24	Kayoa Barat	-	-
25	Kasiruta Barat	-	-
26	Gane Timur Selatan	-	-
27	Batang Lomang	-	-
28	Gane Timur Tengah	-	-
29	Gane Barat Selatan	-	-
30	Gane Barat Utara	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan, 2024

Data di atas diperkuat oleh hasil wawancara dengan para informan penelitian. Wawancara dengan Kepala Bidang SDM Penyuluhan menunjukkan bahwa frekuensi pembinaan kelompok tani umumnya berlangsung dua hingga tiga kali per bulan, dengan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran dan jumlah penyuluhan. Pendampingan idealnya dapat dilakukan setiap hari apabila sumber daya memadai, karena intensitas kunjungan lapangan dinilai penting untuk menjaga motivasi petani dan memastikan proses budidaya berjalan optimal. Hasil wawancara dengan salah seorang petani di

Kecamatan Bacan Timur menyampaikan bahwa penyuluhan secara rutin hadir dua hingga empat kali setiap bulan untuk memberikan pengarahan teknis, meliputi perawatan tanaman, penanganan hama, dan praktik budidaya hortikultura. Selain pendampingan, petani juga menerima bantuan berupa pupuk, bibit, dan alat pertanian yang mendukung kelancaran aktivitas usaha tani.

Dimensi aplikasi menunjukkan bahwa pembinaan kelompok tani telah diimplementasikan melalui prosedur yang jelas, terstruktur, dan berkesinambungan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan

pemerintah daerah. Pelaksanaan program berlangsung melalui tahapan coaching, monitoring, dan evaluasi, yang kemudian diterjemahkan dalam pendampingan rutin oleh penyuluhan melalui kunjungan lapangan, pemberian materi teknis, serta pengawasan proses budidaya. Realisasi di lapangan memperlihatkan bahwa program tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas petani, tetapi juga didukung dengan penyediaan sarana prasarana dan fasilitasi pemasaran hasil panen. Di sisi lain, masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya untuk meningkatkan intensitas pendampingan dan mendukung optimalisasi hasil produksi hortikultura tersebut. Senada dengan hal tersebut, disebutkan bahwa penguatan kapasitas pendamping diperlukan agar pelaksanaan tugas pendampingan dapat berlangsung lebih optimal dalam menunjang proses pemberdayaan masyarakat (Nasution & Mulyana, 2025).

PENUTUP

Implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani sayuran di Kabupaten Halmahera Selatan telah diselenggarakan dengan cukup baik. Struktur program dan dukungan sarana prasarana tersedia, meskipun masih dibatasi oleh anggaran dan jumlah sumber

daya manusia (penyuluhan). Para pelaksana kebijakan memahami arah kebijakan dan menerjemahkannya melalui komunikasi serta pendampingan yang konsisten, meski masih menghadapi kendala rendahnya kesadaran petani dan faktor ekologis. Pelaksanaan pembinaan telah mengikuti prosedur yang terstruktur, namun peningkatan kapasitas sumber daya tetap diperlukan untuk mengoptimalkan hasil produksi hortikultura. Penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji ketahanan pangan secara lebih komprehensif dengan mengukur efektifitas program ketahanan pangan secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2005). *Ekonomi Kelembagaan Pangan*. LP3ES.
- Ariningsih, E., & Rachman, H. P. S. (2008). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(3). <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/713>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Pustaka Pelajar.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Istamto. Raja Grafindo Persada.
- Kalsum, U., Muhammadiyah, & Parawangi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Badan Urusan Logistik Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pinrang. *JPPM: Journal of Public*

- Policy and Management*, 3(2).
[https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.26618/jppm.v3i2.6582](https://doi.org/10.26618/jppm.v3i2.6582)
- Kariyasa, K., & Suryana, A. (2012). Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Pengurangan Pemborosan Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(3). <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/1024>
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Nasution, D. A., & Mulyana. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 7(1). <https://doi.org/10.33701/jpkp.v7i1.5204>
- Rajapakshe, P., Rathnasinghe, N., Guruge, K., Nilmini, R., Jayasinghe, R., Karunaratne, V., Wijesena, R., & Priyadarshana, G. (2026). Strategies to minimize post-harvest waste of fruits and vegetables: Current solutions and future perspectives. *Journal of Future Foods*, 6(3). 10.1016/j.jfutfo.2025.04.013
- Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1). <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Santoso, E. B., & Rahmadanita, A. (2020). Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1400>
- Setiawan, R., Rusli, Z., & Mayarni. (2023). Implementasi Program Ketahanan Pangan. *Fokus*, 21(1).
- Simanjuntak, A. H., & Erwinskyah, R. G. (2020). Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaprojek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2332>
- Wanimbo, P., Aedah, N., & Sapioper, H. C. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(3).
- Zakiya, R., Fatimah, H., Pradana, A., Erisesa, M., & Tania, M. (2024). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Wilayah Pedesaan (Studi pada Praktik Budidaya Ikan di Desa Medaeng, Sidoarjo). *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 2(2). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/25261>
- Zulkarnain. (2009). *Dasar-Dasar Hortikultura*. Bumi Aksara.